



# LEMHANNAS RI

## NEWSLETTER

TIADA KEBENARAN YANG MENDUA

Edisi VIII 20 Maret 2010

### Wawancara Gubernur Lemhannas RI



Prof. DR. Muladi S.H. saat wawancara dengan wartawan dari Majalah Mimbar Politik

Pada tanggal 11 Februari 2010, Gubernur Lemhannas RI Prof. DR. Muladi S.H. di sela-sela kesibukannya beliau meluangkan waktu untuk diwawancarai oleh wartawan dari sebuah majalah politik di Jakarta. Bertempat di Ruang Kerjanya, Gubernur diwawancarai seputar persoalan *law enforcement* yang lemah, yang berakibat salah satunya adalah adanya indikasi mengapa para investor asing kurang berminat menanamkan modalnya di Indonesia. Di dalam negara demokrasi, bila berbicara masalah *good governance* maka, terdapat 3 pilar yaitu: *pertama*, Pilar Negara; *kedua*, Peran Sektor Swasta (*private sector*); *ketiga*, Masyarakat Madani (*civil society*). Sehingga dalam perkembangannya sekarang, negara tidak lagi bisa berdiri sendiri. Hal tersebut antara lain karena pilar swasta cukup menentukan, apalagi di dalam masyarakat madani.

Kesemuanya itu erat kaitannya dengan kondisi negara hukum kita ini yang masih jauh dari memuaskan, belum lagi praktek-praktek yang terjadi akhir-akhir ini, misalnya kasus Bank Century, yang disusul masalah mafia peradilan. Begitu pula terdapatnya kasus-kasus korupsi yang melibatkan para anggota DPR, DPRD, Walikota, dan Bupati, serta Gubernur, bahkan para mantan menteri. Kondisi yang demikian merupakan suatu yang sangat meresahkan kita semua. Selanjutnya Gubernur Lemhannas RI mengatakan bahwa langkah yang diambil Presiden dengan menetapkan hal ini sebagai masalah yang perlu mendapatkan fokus perhatian yang luar biasa, adalah sangat tepat. Sehingga untuk meningkatkan kualitas negara hukum, Gubernur Lemhannas mengatakan bahwa terdapat 3 hal yang sangat penting yaitu: *pertama*, Membangun suatu struktur organisasi yang baik, termasuk SDM-nya. Karena manusia merupakan *main system* dari bangun organisasi; *kedua*, Masalah substansi dan produk perundang-undangan, karena perlu diteliti hal-hal mana yang benar-benar mengidentifikasi

tentang apa saja yang harus diperbaiki dari Undang-undang tersebut; *ketiga*, masalah budaya, karena budaya adalah pandangan, sikap, nilai, persepsi, membangun suatu reformasi birokrasi yang baik, menyangkut aparatur negara. Dari ketiga hal tersebut, poin ketiga ini memang sangat memprihatinkan, karena budaya menghalalkan segala cara masih banyak terjadi di Indonesia. Maka yang kita butuhkan adalah orang-orang yang tangguh, kredibel, kuat dan lugas dalam memimpin lembaga-lembaga hukum, apakah itu Kapolri, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, dan Ketua Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya Gubernur Lemhannas RI, mengatakan bahwa sistem peradilan pidana di semua lini banyak mendapat sorotan masyarakat, terutama lini Kepolisian, lini Kejaksaan Agung, juga Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan. Gubernur Lemhannas RI menjelaskan bahwa bila kita bicara sumber dari korupsi, dapat dirumuskan sebagai:

$$C = M + D - A$$

penjelasan dari rumus tersebut adalah sebagai berikut:

C = *Corruption* (Korupsi);

M = *Man* (Orang) yaitu pejabat yang diberi monopoli kekuasaan, seperti Jaksa, Hakim,

D = *Discretion* (Diskresi) yaitu pejabat yang mempunyai kewenangan untuk mengambil langkah-langkah yang dimungkinkan oleh UU.

A = *Accountability* (pertanggungjawaban)

Seperti pidana pencurian 1 tahun sampai dengan 4 tahun, maka hakim berdasarkan pertimbangan hukum dan keyakinannya dapat menjatuhkan pidana 1 hari atau lebih dari 1 hari dengan batasan maksimal 4 tahun, dan A=Akuntabilitas, yaitu orang yang diberi monopoli kekuasaan dan kewenangan menentukan diskresi yang luas, tetapi tidak menyangkut akuntabilitas, karena akuntabilitas hanya bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, masyarakat dan negara, sedangkan Hakim selain bertanggung jawab pada dirinya sendiri, masyarakat, dan negara, juga bertanggung jawab kepada Tuhan.

#### DAFTAR ISI

1. Wawancara Gubernur Lemhannas RI.....	1
2. Urgensi Revisi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda .....	2
3. Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Konsepsi Nasional, dan Kepemimpinan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pejabat Pemda .....	3
4. Taklimat Awal Pemeriksaan BPK .....	4
5. Upacara Bendera 17 Februari 2010.....	5
6. Sosialisasi Aplikasi Laporan Keuangan Lemhannas RI.....	6
7. Resistensi Rencana Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2010.....	7
8. Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan bagi kepala Divisi dan setara BP MIGAS dan para pimpinan Stakeholder .....	8
9. Rapat Persiapan Penyambutan Kedatangan Obama ke Indonesia .....	9
10. Kebijakan Peningkatan kualitas Penyelenggaraan Ujian Nasional .....	10
11. Intellectual Exercise Dewan Pengarah Lemhannas RI .....	11
12. Forum konsolidasi Pimpinan Pemerintah Daerah .....	12

# Urgensi Revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

**R**oundtable Discussion (RTD) bertema “Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Konteks Pemilihan Kepala Daerah untuk Mendukung Implementasi Sistem Manajemen Nasional di Daerah dalam Rangka Memantapkan Ketahanan Nasional” diselenggarakan pada tanggal 16 Februari 2010 di Ruang Nusantara I Trigatra, Lemhannas RI.

Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Muladi, S.H. membuka



Gubernur Lemhannas RI didampingi Wakil Gubernur memimpin acara Roundtable Discussion

diskusi tersebut dan memberi pandangannya terkait dengan perlunya revisi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Tema ini perlu mendapat prioritas untuk dikaji, sebab memiliki nilai-nilai strategis sebagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Pembahasan undang-undang juga membutuhkan pandangan secara parsial dan komprehensif untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang substansi pemilihan kepala daerah, serta menghindari kesalahan interpretasi atas undang-undang tersebut.

Menurut Gubernur Lemhannas RI, kebijakan desentralisasi dalam konteks pembentukan daerah otonomi adalah pilihan yang tepat, terutama untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan dan pelayanan pemerintahan. Sejak awal, para pendiri Indonesia menyadari bahwa pemerintahan Indonesia tidak bisa dikelola secara sentralisasi, namun pelaksanaan Pilkada yang selama ini penuh dengan gejolak, saling gugat, bahkan konflik antarkelompok tentu saja mengindikasikan pentingnya pembahasan tersebut karena seringkali muncul misinterpretasi soal implementasi undang-undang tentang pengaturan Pilkada. Pilkada yang sebenarnya dibutuhkan untuk tumbuhnya kultur demokrasi ternyata gagal menjadi persemaian demokrasi. Proses Pilkada telah menimbulkan berbagai isu, mulai dari isu efisiensi hingga efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Gubernur juga menambahkan, “Kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintahan di daerah belum berfungsi dengan baik, sehingga sistem manajemen pemerintahan tidak efektif, apalagi bila dikaitkan dengan perilaku bupati atau walikota dalam mekanisme koordinasi pembangunan daerah.”

Rencana besar atau *grand design* dalam revisi UU No. 32 Tahun 2004 menempatkan demokrasi sebagai upaya pemenuhan hak warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan sehingga wujud demokrasi Indonesia harus dirumuskan secara komprehensif dalam konteks ketahanan nasional.

Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam konteks revisi tersebut; *pertama*, asas permusyawaratan perwakilan dalam konteks demokrasi dan mekanisme Pilkada; *kedua*, kedudukan lembaga pemerintahan termasuk hubungan kepala daerah dengan DPRD; *ketiga*, mekanisme kerja antar lembaga pemerintahan (pusat-daerah) dan pemangku kepentingan; *keempat*, kapasitas kepemimpinan dan kemampuan dalam aplikasi Sistem Manajemen Nasional dan kecakapan aparatur; *kelima*, pola perimbangan keuangan pusat dan daerah dan pengelolaan sumber pendapatan daerah; *keenam*, mekanisme perencanaan dan kebijakan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan; dan *ketujuh*, keterkaitan stabilitas daerah dengan kewaspadaan nasional dan ketahanan nasional.

Dari RTD tersebut, Gubernur berharap kajian dapat memberi alternatif yang relevan dengan kerangka demokratisasi dalam proses desentralisasi dan otonomi yang berujung pada rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dan dapat mendukung penerapan sistem manajemen nasional di daerah. Hal ini dilakukan untuk memantapkan ketahanan nasional serta meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.



Suasana acara saat Roundtable Discussion berlangsung di ruang rapat Nusantara I



# Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, Konsepsi Nasional, dan Kepemimpinan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pejabat Pemerintahan Daerah Angkatan XXI Tahun 2010

Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Muladi S.H. pada acara pembukaan kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan pada tanggal 15 Februari 2010 di gedung Dwi Warna Purwa Lemhannas RI, menyatakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan ini merupakan salah satu usaha untuk memperkuat pembangunan demokrasi atau konsolidasi demokrasi, sehingga demokrasi tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga bersifat substansial, dan juga tidak hanya transaksional, tetapi harus bersifat transformasional demi kepentingan bangsa dan negara.

Peranan Kepala Daerah dan DPRD sebagai unsur kepemimpinan publik di daerah, merupakan unsur yang sangat strategis untuk mencapai sasaran tersebut, karenanya prinsip kepemimpinan dalam masa kritis yang perlu diperhatikan, yaitu prinsip kolegialitas yang berarti selalu bekerja secara harmonis; komitmen kuat untuk melaksanakan segala keputusan yang telah diambil; persistensi, selalu gigih dan tekun untuk selalu berbuat yang terbaik dalam menghadapi kendala; autentisitas dalam membangun jaringan pemerintahan; rasa bangga sebagai pejabat publik dengan berusaha tetap memelihara nilai-nilai umum penyelenggaraan negara atau sesuai dengan prinsip *Good Governance*; dan heroisme untuk melaksanakan segala sesuatu secara tuntas dan prima.

Pemantapan nilai-nilai kebangsaan sendiri sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi pada hakikatnya adalah upaya untuk memberi pencerahan secara dialogis

kepada para peserta, agar peserta mampu berpikir secara sistemik dan komprehensif untuk kepentingan nasional; menumbuhkan sikap antisipatif, kooperatif, sinergis terhadap kepentingan rakyat, peduli terhadap potensi yang dimiliki daerah dan menumbuhkan kemandirian daerah, serta komitmen terhadap kelangsungan pembangunan nasional yang menjamin ketentraman masyarakat serta kesejahteraan rakyat.



*Penyematan tanda peserta kepada salah satu perwakilan peserta kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, Konsepsi Nasional, dan Kepemimpinan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pejabat Pemerintahan Daerah*



*Menyanyikan lagu Indonesia Raya saat mengawali upacara pembukaan acara kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, Konsepsi Nasional, dan Kepemimpinan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Pemda Angkatan XXI 2010*



*Para peserta kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, Konsepsi Nasional, dan Kepemimpinan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Pemerintahan Daerah Angkatan XXI 2010*

## TAKLIMAT AWAL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN LEMHANNAS RI

Sebagai fungsi utamanya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melaksanakan pemeriksaan pada Lembaga Ketahanan Nasional RI (Lemhannas RI), pada 17 Februari 2010. “Setiap tim pemeriksa BPK memiliki tanggung jawab yang berat untuk melaksanakan tugas kenegaraan guna selanjutnya mempertanggungjawabkannya kepada rakyat melalui lembaga legislatif,” demikian awal sambutan Gubernur Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi, S.H. pada acara taklimat awal pemeriksaan BPK RI di Ruang Rapat Nusantara I Trigatra Lemhannas RI.

Gubernur berharap, tim pemeriksa dan instansi atau unit kerja yang diperiksa agar dapat bekerja sama dengan baik untuk menjaga dan menegakkan independensi dan profesionalisme lembaga pemeriksa. Hal ini perlu mendapat perhatian, dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang baik, sebagai ciri *Good Governance*.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga memaparkan revitalisasi organisasi dan reformasi birokrasi yang tengah dilakukan Lemhannas RI, seperti program pengembangan Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtannas) dan program-program lain yang berbasis informasi dan teknologi komunikasi (*Information and Communication Technology*).

Dalam pelaksanaan anggaran, Pimpinan Lemhannas RI terus berupaya meningkatkan pengendalian anggaran yang dituangkan dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran; evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran melalui rapat pimpinan; pelaksanaan pengawasan internal oleh Inspektorat; maupun evaluasi atau monitoring yang dilakukan oleh Dewan Pengarah melalui rapat internal. Perbaikan ini juga dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja lembaga dan menjadikan Lemhannas RI sebagai *center of excellence* lembaga sejenis di tingkat Regional maupun Internasional.



Suasana saat Taklimat Awal Pemeriksaan BPK berlangsung di ruang rapat Nusantara I, Gedung Tri Gatra Lt. 1 Lemhannas RI yang dipimpin oleh Prof. Dr. Muladi S.H. selaku gubernur Lemhannas RI



# UPACARA BENDERA 17 FEBRUARI 2010



*Persiapan pengibaran Bendera Merah Putih pada Upacara Bendera 17 Februari 2010.*

Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Muladi, S.H. pada Upacara Bendera 17 Februari 2010 menyampaikan beberapa hal dan harapannya terutama terkait dengan peningkatan dan pelaksanaan program kerja, yaitu:

**Pertama**, berkaitan dengan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI). Lembaga Ketahanan Nasional RI mendapat Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian pada tahun 2007 dan 2008. Gubernur berharap, tiap unit kerja dapat bekerja sama dalam mengendalikan anggaran dan juga dalam menjalankan program kerja, agar dapat menunjukkan optimalisasi kinerja, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga Lemhannas RI dapat kembali memperoleh predikat mantap Opini Wajar Tanpa Pengecualian di tahun 2009.

**Kedua**, berkaitan dengan program reformasi birokrasi, agar tim terpadu Lemhannas RI mempercepat proses administrasi reformasi birokrasi yang sedang disusun dengan sebaik-baiknya.

**Ketiga**, PPRA XLIV saat ini sedang melaksanakan program pendidikan jarak jauh atau *off campus* selama tiga bulan dengan menggunakan sarana *e-learning*. Sedangkan pada 9 Maret sampai 15 April 2010, Lemhannas RI akan menyelenggarakan forum konsolidasi pimpinan daerah yang terdiri dari para bupati, walikota, dan ketua DPRD kabupaten dan kota.

**Keempat**, Deputi Bidang Pengkajian Strategik menyelenggarakan *Roundtable Discussion* (RTD), diantaranya: 18 Februari 2010, Direktorat Pengkajian Bidang Sosial Budaya melaksanakan RTD dengan judul "**Kebijakan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ujian Nasional, untuk Menentukan Kelulusan Siswa dan Pemetaan Mutu Pendidikan di Indonesia yang Berbasis Iptek, dalam Rangka Memantapkan Daya Saing di Kawasan Regional dan Global**" dan 23 Februari 2010, Direktorat Pengkajian Bidang Politik melaksanakan RTD dengan judul "**Resistensi Rencana Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2010, guna Menjaga Stabilitas Keamanan, dalam Rangka Memperkokoh Ketahanan Nasional**".

**Kelima**, penyelenggaraan kegiatan Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan diantaranya tanggal 8-12 Februari 2010 menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan nasional HIPMI angkatan I, dan tanggal 15-19 Februari 2010 dan pelatihan pemantapan nilai-nilai kebangsaan, konsepsi nasional, dan kepemimpinan bagi anggota DPRD yang tergabung dalam Adeksi (Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia). Kemudian, tanggal 22-25 Februari 2010 kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi para pimpinan setingkat kepala divisi atau kepala dinas, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas).

# Sosialisasi Aplikasi Laporan Keuangan Lemhannas RI

**B**iro Perencanaan dan Keuangan Lemhannas RI, menyelenggarakan Sosialisasi Aplikasi Pelaporan Lemhannas RI pada 10 Maret 2010 di Gedung Tri Gatra Lt. III barat. Sosialisasi ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 mengenai Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, serta bentuk evaluasi pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Biro Perencanaan dan Keuangan pada kesempatan tersebut mensosialisasikan mekanisme pelaporan yang benar. Selanjutnya, Lemhannas RI membuat lima bentuk laporan: **pertama**, Laporan Program Kerja, diserahkan dan diperiksa oleh BPKP dan BPK; **kedua**, Laporan Konsolidasi Program, diserahkan dan diperiksa oleh Bappenas; **ketiga**, Laporan Analisis dan Evaluasi, diserahkan dan diperiksa oleh BPKP dan BPK; **keempat**, LAKIP, diserahkan dan diperiksa oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; **kelima**, Laporan Akuntansi, diserahkan dan diperiksa oleh Departemen Keuangan dan BPKP.

Dalam kesempatan tersebut, juga dipaparkan kendala laporan keuangan yang selama ini terjadi di Lemhannas RI, yaitu **pertama**, terlambatnya penyerahan laporan keuangan dari unit kerja Lemhannas RI; **kedua**, kurang pahamnya unit kerja dalam penyusunan laporan keuangan; **ketiga**, penyampaian laporan keuangan belum menjadi bagian



*Suasana Sosialisasi Aplikasi Pelaporan Lemhannas RI yang berlangsung pada 10 Maret 2010 di Gedung Tri Gatra lantai 3 barat Lemhannas RI.*



*Sosialisasi Aplikasi Pelaporan Lemhannas RI yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan Lemhannas RI*

dari kegiatan / sub kegiatan; **keempat**, belum ditunjuknya petugas untuk membuat laporan keuangan.

Guna mendukung kelancaran pelaksanaan pelaporan rencana kegiatan pembangunan yang didukung dengan penggunaan aplikasi, maka dilakukan perbaikan terhadap aplikasi yang sudah dipublikasikan sejak tahun 2008. Beberapa perubahan pada aplikasi Peraturan Pemerintah No. 39/2006 untuk versi tahun 2010, antara lain: **pertama**, Penyempurnaan struktur basis data; **kedua**, Penambahan digit sub kegiatan; **ketiga**, Penyesuaian referensi data mengikuti dokumen DIPA 2010; **keempat**, Perubahan tampilan aplikasi; **kelima**, Perubahan hasil tampilan cetakan laporan, sedangkan tipe file cetakan masih tetap dalam format .xml

Dari hasil pelaksanaan laporan PP No. 39 Tahun 2006 terdapat beberapa evaluasi, yaitu dari sektor dana, di beberapa satuan kerja tidak ada alokasi anggaran monitor dan evaluasi (monev); tim monev, pada sektor ini jumlah personil umumnya tidak cukup dibandingkan dengan jumlah kegiatan yang harus dimonitor dan dievaluasi; waktu pelaporan; format pelaporan, yakni seperti masih ditemukannya satuan kerja yang membuat laporan dengan format yang bervariasi atau tidak sesuai standar atau masih sering kosong; serta indikator dan objektivitas, masalah yang terjadi seperti pelaksanaan monitoring masih sering dianggap sebagai rutinitas dan tidak ada tindak lanjut.



# Resistensi Rencana Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2010

**P**ada 23 Februari 2010, Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Muladi, S.H. menyampaikan *keynote speech*-nya pada acara *Roundtable Discussion* Pengkajian Strategik dengan topik “Resistensi Rencana Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2010 guna Menjaga Stabilitas Keamanan dalam Rangka Memperkokoh Ketahanan Nasional”, di Ruang Rapat Nusantara I, Gedung Trigatra.

Sejak tahun 2005-2008, sebanyak 476 daerah di Indonesia telah menyelenggarakan pilkada, dan sebanyak 210 kasus sengketa pilkada diselesaikan melalui pengadilan. Bagi Gubernur, penyelesaian sengketa pilkada lewat pengadilan merupakan bukti adanya konflik dan gangguan keamanan akibat penyelenggaraan pilkada.

Dalam sambutannya, Gubernur menyebutkan penyebab konflik pada pilkada antara lain karena tidak akuratnya data Daftar Pemilih Tetap (DPT); pendistribusian kotak suara; kertas suara; mobilisasi pemilih; penggelembungan suara; dan politik uang (*money politics*). Masyarakat yang memilih golput atau kertas suara yang tidak sah diduga sebagai pemicu resistensi terhadap penyelenggaraan pilkada.

Akumulasi konflik yang terjadi selama pilkada, juga memicu timbulnya pemikiran untuk menolak / resisten terhadap penyelenggaraan pilkada di masa mendatang, meskipun itu merupakan dinamika politik dan sosial.



Suasana saat Roundtable Discussion berlangsung yang dipimpin oleh Gubernur Lemhannas RI



Para penanggung yang turut serta dalam Roundtable Discussion Pengkajian Strategik di Lemhannas RI

“Namun, konflik yang terjadi di berbagai daerah hendaknya tidak digeneralisasikan secara nasional, justru kita harus berpikir secara jernih dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pilkada, sehingga dapat meminimalkan konflik,” Gubernur menambahkan.

Melihat pengalaman banyaknya konflik yang terjadi selama penyelenggaraan pilkada, Gubernur Lemhannas RI, memberi masukan untuk didiskusikan, yaitu:

**Pertama**, tetap menyelenggarakan pilkada dengan baik dan demokratis, dan tidak menimbulkan konflik atau gangguan kamtibmas yang justru melemahkan ketahanan daerah;

**Kedua**, Penyelenggaraan pilkada merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945.

**Ketiga**, Bagaimana menciptakan sistem yang efektif dan efisien bagi *stakeholders* pilkada (KPU, parpol, calon, tim sukses, dan lain lain) sehingga masyarakat dapat menerima penyelenggaraan pilkada tersebut;

**Keempat**, bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pilkada untuk meminimalisir kelompok masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya, sehingga dapat meningkatkan legitimasi kepala daerah terpilih.

**Kelima**, Bagaimana menekan atau menurunkan biaya (*cost*) dari setiap penyelenggaraan pilkada.

# PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN BAGI KEPALA DIVISI DAN SETARA BP MIGAS DAN PARA PIMPINAN STAKEHOLDER



Suasana Upacara pembukaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan bagi Kepala Divisi dan yang setara dari BPMigas dan para pimpinan stakeholder di Gedung Dwi Warna Purwa, Lemhannas RI.

**P**emantapan Nilai-nilai kebangsaan Indonesia sebagai perekat kesatuan nasional Indonesia telah tumbuh sejak berseminya kesadaran kebangsaan yang pluralistik di sanubari pemuda-pemuda Indonesia, tidak hanya saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, tetapi jauh sebelumnya yakni sejak 20 Mei 1908 dan 28 Oktober 1928, yang merupakan peristiwa sejarah yang sangat monumental dalam sejarah Republik Indonesia.

Gubernur Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi, S.H. mengingatkan hal itu kepada para Kepala Divisi dan yang setara dari BP Migas dan para pimpinan *stakeholders* pada saat mengikuti pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI pada Senin, 22 Februari 2010 di Lemhannas RI.

Selanjutnya, Gubernur Lemhannas RI menjelaskan bahwa, pemantapan atau konsolidasi nilai-nilai kebangsaan memerlukan pemahaman bersama (*equal understanding*) bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai kebangsaan, harus berakar pada suatu proses interaksi yang makin luas dan terbuka dan dilandasi semangat kebhinnekaan atau kemajemukan menuju pada satu tatanan nilai yang diterima oleh semua kelompok masyarakat dan sesuai dengan dinamika zamannya. Kebersamaan dalam satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air, bagi bangsa Indonesia yang sangat pluralistik harus dibangun atas dasar jiwa dan semangat nilai-nilai objektif dan *non-primordialistik*.

Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) sebagai institusi yang dipercaya oleh pemerintah untuk mengelola kekayaan alam Indonesia, memegang peranan yang sangat strategis dalam memberi kontribusi pendapatan negara guna membiayai pembangunan demi tercapainya

keamanan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dengan dilaksanakannya pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi para kepala divisi atau yang setara serta pada pimpinan mitra kerjasama dan *stakeholders* yang terkait dengan BPMigas, merupakan upaya nyata untuk melakukan transformasi sikap dan moral kepemimpinan sejalan dengan tuntunan *good governance* dan *clean government*, atas dasar jati diri bangsa, sehingga akan mampu memadukan kepentingan nasional, baik kepentingan pusat maupun kepentingan daerah secara rasional dengan orientasi dan tujuan untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia.

Pada akhir sambutannya, Gubernur Lemhannas RI mengatakan bahwa dalam memperhatikan tantangan bangsa Indonesia ke depan dan untuk menghilangkan beberapa persepsi yang salah dari sebagian kelompok terhadap nilai-nilai luhur pancasila, UUD RI 1945, prinsip NKRI dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, maka program pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi pejabat di lingkungan lembaga strategis seperti BP Migas, *Vice President*, kontraktor kerjasama, dan pimpinan *stakeholders* menjadi sangat relevan untuk dilaksanakan agar lebih memotivasi dan meningkatkan nasionalisme yang tinggi sehingga dapat semakin memperkokoh ketahanan nasional. Dengan pemantapan ini, para peserta diharapkan mampu berpikir secara sistemik dan komprehensif, integral untuk kepentingan nasional dalam kerangka NKRI; menumbuhkan sikap responsif, antisipatif, kooperatif, sinergik, terhadap kepentingan rakyat; peduli terhadap potensi yang dimiliki daerah dan menumbuhkembangkan kemandirian daerah serta komitmen terhadap kelangsungan pembangunan nasional yang menjamin kesejahteraan, demokrasi, dan keadilan dalam rangka *good governance*.



Foto bersama peserta kegiatan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan bagi Kepala Divisi dan yang setara dari BPMigas dan para pimpinan stakeholder dengan Gubernur Lemhannas RI beserta pejabat Lemhannas lainnya.



# Rapat Persiapan Penyambutan Kedatangan Obama ke Indonesia



*Suasana rapat dalam rangka kunjungan Presiden Amerika Serikat, Barrack Obama ke Indonesia yang dihadiri pihak Lemhannas RI, AIPI, UI dan Perwakilan Amerika Serikat*

**P**ada tanggal 11 Maret 2010 di ruang rapat Nusantara I Gedung Tri Gatra Lemhannas RI, dilaksanakan rapat persiapan dalam rangka kunjungan Presiden Amerika Serikat, Barrack Obama, ke Indonesia untuk mengadakan kegiatan ceramah umum (*public lecture*) di Jakarta.

Rapat yang dihadiri antara lain oleh Rektor Universitas Indonesia, Gubernur Lemhannas RI, Ketua AIPI, Sekretaris Dewan Pengarah Lemhannas RI, Sektama Lemhannas RI, Dirjen Kemenlu RI, dengan tiga orang perwakilan dari kedutaan Amerika Serikat baik dari perwakilan Amerika Serikat di Washington maupun dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta sendiri, membicarakan hal-hal teknis terkait dengan rencana kegiatan tersebut.

Perwakilan dari Amerika Serikat memberikan apresiasi yang mendalam kepada panitia atas dukungan yang diberikan, dan kedua belah pihak berkomitmen untuk menjadikan kunjungan ini sebagai sebuah kunjungan yang *extraordinary* (*extraordinary visit*). Ceramah umum (*public lecture*) oleh Presiden AS, Barrack Obama adalah menjadi salah satu program penting yang dilaksanakan.

Sesuai dengan tujuan yang akan disampaikan dalam ceramah umum tersebut, yaitu *Unity in Diversity*, pihak Amerika Serikat menyampaikan bahwa mereka ingin

mengundang masyarakat Indonesia sebanyak-banyaknya dari berbagai kalangan secara terbuka. Hal ini disambut oleh ketua panitia yang mengatakan bahwa rakyat Indonesia sudah lama menunggu-nunggu kesempatan ini, dikarenakan apresiasi terhadap latar belakang Presiden Amerika Serikat, Barrack Obama yang pernah tinggal selama beberapa tahun di Indonesia pada masa kecilnya. Selain itu juga disampaikan oleh perwakilan dari Amerika Serikat, bahwa Obama juga sudah merindukan untuk “pulang kampung”.

Dalam pertemuan itu, dibicarakan beberapa isu teknis terkait dengan kunjungan tersebut, antara lain: akses dan sarana transportasi, sosialisasi acara, keamanan, hingga program hiburan untuk para pengunjung yang cukup banyak. Karenanya panitia perlu mempersiapkan dan merencanakan hal tersebut secara baik dan matang mulai dari saat para pengunjung datang dan mengantri, maupun ketika mereka mendengarkan ceramah umum, dan meninggalkan lokasi acara.

Pada acara akhir, Dirjen Kemenlu RI menegaskan bahwa pada acara tersebut nantinya tidak akan ada *introduction remark* oleh Presiden RI.

# Kebijakan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ujian Nasional



Roundtable Discussion Sosbud yang diselenggarakan di Ruang Rapat Nusantara I, Tri Gatra Lt. I pada 18 Februari 2010.

Gubernur Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi, S.H. dalam *Keynote Speech* pada *Roundtable Discussion* Pengkajian Strategik “Kebijakan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ujian Nasional, Untuk Menentukan Kelulusan Siswa dan Pemetaan Mutu Pendidikan di Indonesia yang Berbasis IPTEK, dalam Rangka Memantapkan Daya Saing di Kawasan Regional dan Global”, menyatakan penyelenggaraan ujian nasional dalam kesejarahannya memiliki kelemahan, karena sulit untuk mengukur dan memetakan kualitas pendidikan secara nasional, akhirnya mulai tahun 2002 hingga kini dikeluarkan kebijakan ujian nasional yang diharapkan dapat digunakan untuk mengatur sistem kelulusan dan sekaligus untuk mengukur dan memetakan kualitas pendidikan secara nasional.

Dalam perkembangannya, masyarakat mendesak pemerintah untuk meninjau kembali sistem pendidikan nasional dan juga meningkatkan kualitas guru, sarana prasarana pendidikan, serta informasi, khususnya di daerah pedesaan. Masyarakat khawatir, ujian nasional menjadi bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang serius terhadap para siswa, serta meninjau kembali sistem pendidikan nasional dengan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menyebutkan beberapa langkah strategis dan telaah yang perlu dipertimbangkan dalam menyelenggarakan ujian nasional yang jujur dan kredibel, antara lain:

**Pertama**, mencegah kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan ujian nasional oleh aparat pemerintah termasuk kepala sekolah, pengawas, dan guru.

**Kedua**, mengajak berbagai komponen masyarakat

termasuk dewan pendidikan dan komite sekolah untuk bersama-sama mendukung penyelenggaraan ujian nasional yang jujur dan kredibel.

**Ketiga**, menyediakan fasilitas pusat penanggulangan masalah ujian nasional di setiap Kepolisian Daerah (Polda) di seluruh Indonesia.

**Keempat**, perlunya menangani beban psikologis bagi siswa dengan memberi kesempatan ujian ulang bagi siswa yang tidak lulus pada ujian utama, penyebarluasan kisi-kisi mata pelajaran ujian nasional, dan kebijakan peserta didik untuk dapat menentukan sendiri mata pelajaran yang bernilai 5.50 yang akan diulang, serta nilai yang dipakai dalam penentuan kelulusan adalah nilai terbaik dan bagi peserta didik yang belum lulus pada ujian ulang dimungkinkan ujian nasional pendidikan kesetaraan A, B, C.

Sedangkan telaah terhadap ujian nasional yang perlu dilakukan, yaitu:

**Pertama**, apakah undang-undang dan peraturan pemerintah itu telah memenuhi standar kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan tuntunan pelaksanaan tugas secara profesional.

**Kedua**, apakah sistem pendidikan telah mempunyai tujuan dan arah yang jelas untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memiliki penilaian yang tepat.

**Ketiga**, bagaimana pelaksanaan manajemen pendidikan dan sistem pendidikan nasional dapat terintegrasi mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi.



Pelaporan dari Deputy Pengkajian Strategik selaku ketua penyelenggara kepada Gubernur dalam Roundtable Discussion Sosbud yang juga dihadiri Wamendiknas, Prof. Dr. Fasli Jalal, PhD, SpG



# INTELLECTUAL EXERCISE DEWAN PENGARAH LEMHANNAS RI



*Prof. Dr. Dorodjatun Kuntjorojakti membuka Intellectual Exercise Dewan Pengarah Lemhannas RI sekaligus sebagai moderator.*

*Intellectual Exercise* yang diselenggarakan Dewan Pengarah Lemhannas RI pada hari Senin, 15 Maret 2010 pukul 09.00 sampai dengan selesai di Gedung Asta Gatra Lt. III Barat Lemhannas RI kali ini dibuka oleh Prof. Dr. Dorodjatun Kuntjorojakti yang sekaligus bertindak sebagai moderator, dihadiri oleh para anggota Dewan Pengarah, Tenaga Ahli Pengajar, dan Tenaga Ahli Pengkaji Lemhannas RI.

Kegiatan rutin yang diselenggarakan setiap satu bulan sekali ini memaparkan empat presentasi para pemakalah, yaitu:

1. “Permasalahan dan Solusi Kepemimpinan Nasional (Khususnya Eksekutif dan Legislatif di tingkat pusat)” oleh Dr. H. Darmakusuma, M.Si.
2. “Kepemimpinan Nasional dalam Mengatasi Permasalahan Bangsa Tahun 2010” oleh Mayjen TNI Sardjono WD, S.Ip.
3. “Meningkatkan Citra Penegakan Hukum guna Mendukung Keberhasilan Kinerja Pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu II dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Nasional” oleh Irjen Pol. Drs. Zainal Abidin Ishak.
4. “Konsistensi *Criminal Justice System* (CJS) dalam Memberantas Makelar Kasus” oleh Irjen Pol Drs. Alpiner Sinaga.

# Forum Konsolidasi Pimpinan Pemerintahan Daerah

Lemhannas RI pada 9 Maret 2010 mengawali program kegiatan Forum Konsolidasi Pimpinan Pemerintahan Daerah Bupati, Walikota, dan Ketua DPRD Kabupaten / Kota Angkatan III yang diikuti oleh 48 orang peserta, terdiri dari 17 bupati, 2 wakil bupati, 4 walikota, 2 wakil walikota, 16 ketua DPRD kabupaten, 1 wakil DPRD kabupaten, dan 6 dari DPRD kota. Melalui Forum Konsolidasi ini, Lemhannas RI mendapat tugas untuk memantapkan para pimpinan pemerintahan daerah khusus para bupati, walikota, dan ketua DPRD kabupaten/kota agar memiliki keunggulan komparatif dan menguasai keunggulan kompetitif serta memiliki kemampuan strategis dalam mengantisipasi dan mengatasi krisis dalam negeri di daerah, ancaman regional maupun internasional secara utuh menyeluruh dan terpadu berdasarkan konstitusi, wawasan nusantara dan ketahanan nasional dalam rangka pembangunan daerah.

Forum Konsolidasi ini akan berlangsung selama enam minggu dan dirancang dengan kurikulum yang bermuara pada peningkatan mutu kualitas dari para pemimpin untuk memiliki tingkat standar yang lebih tangguh.

Dalam sambutannya pada upacara pembukaan forum tersebut, Gubernur Lemhannas RI menekankan akan pentingnya pimpinan yang memiliki wawasan kebangsaan dalam perspektif ketahanan nasional yang tangguh, yang mampu menghadapi tantangan dan ancaman komprehensif dari dalam maupun luar negeri, baik yang membahayakan Negara maupun membahayakan umat manusia atau perpaduan antara keduanya (*hybrid*).



*Penyematan tanda peserta kepada perwakilan peserta kegiatan Forum Konsolidasi di Lemhannas RI*



*Suasana saat Upacara pembukaan Forum Konsolidasi yang diawali dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Hymne Wawasan Nusantara*

**Pengarah :** DR. Ardi Partadinata, MH, M.Si.

**Penanggung Jawab :** Brigjen TNI Kusworo, **Redaktur :** Kolonel Ckm (K) Dr. Zawiah Ramlie, MH, M.Sc

**Penyunting/Editor :** Kolonel Caj. M. Sochib SM., Letkol Adm. Drs. M. Syahril, MM, Mayor Inf. Risnal SH. MA.

**Redaktur Pelaksana :** Linda Purnamasari. , Mayor Caj (K) Rita Ratnayu

**Desain Grafis & Fotografer :** Arief Musadayan, Arianto, Bambang Iman Aryanto, Hendrik Garang,

**Sekretariat :** Syafrizal, Gatot

**Alamat Redaksi :** Biro Humas Settama Lemhannas RI, Jl. Merdeka Selatan No. 10 Jak-Pus (10110)

Telp. (021) 3832108, 3832109, Fax. (021) 3451926